

Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pembinaan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru

Gunawan Rama Putra¹ Evi Zubaidah²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
gtratraa27@student.uir.ac.id evizubaidah@soc.uir.ac.id

Received : August 22, 2024;

Accepted : August 25 2024

Abstract

The aim of this research is to determine the strategy of the Department of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in developing micro, small and medium enterprises (UMKM) in Pekanbaru City and the inhibiting factors. One of the community empowerment efforts is through policies for the development and empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). The Pekanbaru City Cooperatives and UMKM Department has tried to provide capital assistance, loans or credit to UMKM, but is still unable to improve and develop UMKM so that they are resilient and independent in various situations. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. The informants in this research were the Head of the Pekanbaru Discop Data Collection Section, and the MSME community in Delima Village, Tampan District, Pekanbaru City. The results of the research are Community Empowerment by the Department of Cooperatives and Micro, Small Enterprises. The strategy of the Department of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in developing Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Pekanbaru City as a whole has not been implemented optimally. Human Development is sufficient to produce competent coaching participants, Business Development has provided coaching for participants in accordance with the participants' abilities and expertise.

Keywords: Role, Development, Micro, Small and Medium Enterprises

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru serta faktor penghambatnya. Upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah melalui kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sudah berupaya memberikan bantuan modal, pinjaman atau kredit kepada pelaku UMKM, tetapi masih belum mampu meningkatkan dan mengembangkan UMKM agar tangguh dan mandiri dalam berbagai situasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pendataan Diskop Pekanbaru, dan Masyarakat pelaku UMKM di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian yaitu Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru secara keseluruhan belum optimal dilaksanakan. Bina Manusia sudah cukup dapat menghasilkan peserta pembinaan yang berkompeten, Bina Usaha sudah memberikan pembinaan bagi peserta sesuai dengan kemampuan dan keahlian peserta.

Kata Kunci : Peran, Pembinaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pendahuluan

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan itu sendiri baik pembangunan, pemberdayaan, perencanaan dan lain lain. Tak terkecuali Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru yaitu sesuai dengan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan Tugas Pokok lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru yang berbunyi; “Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota pekanbaru dibidang koperasi, usha mikro, kecil, dan menengah”. Adapun pada Dinas Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Kota Pekanbaru yang melakukan pembinaan pada koperasi di Kota Pekanbaru adalah bidang Bidang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang terdiri dari Seksi Pembinaan dan Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, Seksi promosi dan Investasi usaha mikro, kecil dan menengah dan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana usaha mikro, kecil dan menengah yang secara keseluruhan jumlah pegawai pada bidang tersebut sebanyak 22 orang dengan status aparatur sipil negara dan 24 orang non aparatur sipil negara.

Di Kota Pekanbaru sendiri lebih dari 10.000 usaha mikro, kecil dan menengah yang terbagi ke dalam beberapa bidang usaha dan terbagi pula ke dalam beberapa tingkatan usaha mulai dari mikro kecil sampai menengah. Dalam penelitian ini peneliti fokus melalukukan penelitian pada Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam mengimbangi pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Pekanbaru maka perlu diadakannya pelatihan atau pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru selama min 3 sampai 5 kali dalam setahun yang ditentukan oleh agenda yang ditetapkan dinas tersebut.

Dari UMKM yang dibina yang terdata oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru yaitu pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pembinaan UMKM karena sedang adanya virus corona, pada tahun 2022 ada sebanyak 1.642 UMKM yang dibina dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah UMKM yang dibina sebanyak 3.052 UMKM, karena semakin meningkatnya antusias masyarakat Kota Pekanbaru yang ingin mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Peningkatan usaha dari mikro sampai menengah cenderung mengalami kondisi stagnan dan cenderung menurun hal ini menunjukkan bagaimana kualitas umkm masih kurang. yang menjadi fokus penelitian saya adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas UMKM di tengah sumber daya manusia yang melakukan pemberdayaan yang terbatas dan jumlah UMKM yang sangat banyak dan apakah strategi telah maksimal dilakukan. Dari hasil observasi penulis menemukan beberapa fenomena antara lain : Dinas Koperasi UMKM telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan pengenbangan usaha kepada pelaku usaha UMKM berbentuk pengetahuan akan tetapi belum memperkuat kemampuan para pelaku usaha UKM. Walaupun Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru memberikan bimbingan tentang cara peningkatan pemasaran Produk tetapi tidak

di bekali tentang bagaimana menganalisis peluang usaha. Iklim Usaha yang belum stabil dan daya beli yang turun menyulitkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya yang bisa mengakibatkan pelaku usaha kerugian dan bahkan bangkrut. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM harus responsif dalam upaya menjaga stabilitas iklim Usaha serta ekonomi kerakyatan yang sehat dan berbasis Pasar yang berkeadilan. Masih kurangnya informasi dan tenaga ahli serta praktisi wirausahawan dalam memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaku usahawan pemula dalam mengatasi masalah manajemen pengelolaan usaha, Akses Kredit Usaha, Promosi Produk, Kualitas Produk serta iklan dan pemasaran produk pelaku usaha.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Siagian (2003:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004: 37) adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta lain.

Definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan menggerakkan suatu organisasi pemerintah.

Konsep Organisasi

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Gibson, et. Al (1996:6) mendefinisikan "organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri".

Menurut Robbin (2000:4) "organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan".

Konsep Manajemen

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial

untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahawa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Konsep Kebijakan Pemerintah

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai- nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Jnimengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu orgamsasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2003;493- 494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan berkaitan dengan pemerintahan maupun masyarakat secara umum. (Dwiyanto, 2017:17)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Konsep Peran

Peranan menurut Soekanto (2001:269) adalah konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat sosial. (Irwandi, 19)

Menurut Ndraha (2005:53) peran di artikan sebagai suatu pelaku yang di harapkan atau di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator. Sehingga dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa peranan adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu atau organisasi dan diharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi (Sarwono dalam Hutami, 2011).

Pengembangan Bangsa (1989) Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan definisi lain, peran adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi atau individu yang penting bagi struktur social (Soekanto, 1997). Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran (Carapedia,2018). Menurut Abdulsyani (2007), peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya, maka hal ini dapat dikatakan individu tersebut menjalankan suatu peran. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan dimasyarakat, maka terdapat kecenderungan mengenai adanya suatu harapan-harapan baru. Adapun teori peran menurut (Jim Iffe, 2014) peran adalah proses pengembangan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlakukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Peran terbagi atas sebagai berikut:

Konsep Pembinaan

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pembinaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat di mobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pembinaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (*power*) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Dengan demikian, pembinaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pembinaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pembinaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atau berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (Toha. 2002;7).

Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam peneliitan ini yaitu deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan key informant, yaitu informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pembinaan dan sebagai subjek penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2011;216)

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey merupakan unit yang melakukan pembinaan pada UMKM di Kota Pekanbaru.

Informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru dan UMKM yang dibina.

Hasil dan Pembahasan

Peran dalam mengenali khalayak sasaran yaitu para pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru berdasarkan pada beberapa kriteria yang telah ditentukan dan beberapa aspek yang perlu di perhatikan. Kriteria yang dimaksud adalah usaha yang dijalankan merupakan usaha yang mulai berkembang ditandai dengan meningkatnya omset usaha, kualitas produk yang sudah terjamin, kelancaran dalam pengembalian kredit baik yang di tawarkan maupun yang di ajukan ke Bank, LKM, ataupun Koperasi simpan pinjam.

Untuk mengetahui aspek- aspek tersebut, pihak Diperindag Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru sebelumnya telah melakukan pendataan para pelaku usaha yang terdapat di Kota Pekanbaru. Meski tidak semua usaha menjadi usaha binaan, namun pihak dinas perlu mengetahui untuk tujuan sosialisasi lainnya mengenai usaha. Dengan gambaran khalayak sasaran melalui aspek tersebut maka akan mudah bagi komunikator menentukan pesan yang akan disampaikan.

Peran Fasilitator

Peran fasilitator merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok- kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan lurah dalam memebekali anggota/perangkatinstan melalui penyuluhan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bina Manusia, merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Termasuk dalam upaya Bina Manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas. Sebelum proses pelaksanaan komunikasi, perlu dipelajari objek yang akan menjadi sasaran komunikasi, misalnya dalam penelitian ini sasaran komunikasi yang akan dilakukan kepada pemilik UMKM dan yang mengikuti pembinaan.

Berdasarkan data tersebut komunikator sudah dapat menentukan tujuan atau sasaran yang ingin di capai, isi pesan yang akan di sampaikan, media yang di gunakan serta teknik-teknik atau peran komunikasi yang di gunakan untuk mempengaruhi khalayak. Namun hal ini bergantung pada tujuan komunikasi, apakah komunikan hanya sekedar mengetahui atau komunikan bertujuan melakukan tindakan tertentu. Organisasi perlu mengidentifikasi sasaran mereka dalam arti dengan siapa mereka perlu berkomunikasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan adanya program pembinaan oleh pemerintah kabupaten di harapkan agar pelaku usaha dapat terus mengembangkan usaha yang di jalankan sehingga dapat mendukung perekonomian baik masyarakat maupun daerah. Meskipun hanya pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk ikut pembinaan, pihak dinas berharap ilmu yang didapatkan dalam pembinaan tersebut dapat di bagikan juga kepada pelaku usaha lainnya sehingga UMKM lain turut berkembang dan memberi kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk mengembangkan suatu program pengorganisasian yang sistematis, terencana, berkelanjutan dan mampu mentransformasikan diri menjadi salah satu pilar gerakan, terdapat dua masalah utama yang kerap muncul, yakni: Pertama, masalah kualifikasi kemampuan organiser untuk dapat memberikan konsultasi dan asistensi kepada UMKM sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kualitas organiser yang diperlukan, bukan sekedar mau akan tetapi juga mampu. Dengan demikian, organiser harus memiliki pemahaman minimal mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM untuk tumbuh dan berkembang, dan juga memahami mengenai jaringan UMKM, sehingga memiliki kemampuan untuk memediasi UMKM.

Peran Inisiator

Peran inisiator adalah suatu kemampuan dalam menemukan peluang, menemukan ide atau mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan.

Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan lurah untuk memberi arahan petunjuk atau langkah- langkah yang harus dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Bina Usaha, menjadi suatu upaya penting dalam setiap Pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) dan tidak laku dan bahkan menambah kekecewaan. sebaliknya hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat

Kendala perizinan masih menjadi hambatan yang besar dalam pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman tentang fungsi dari IUMK itu sendiri. Kekurangpahaman tersebut mengakibatkan para pelaku UMKM masih sulit mendapatkan pinjaman modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman modal yaitu IUMK. Tanpa IUMK para pelaku UMKM tidak akan mendapatkan akses promosi dari pemerintah, sedangkan promosi merupakan kebutuhan utama didalam menjalankan UMKM agar diketahui oleh khalayak ramai.

Peran Organisator

Peran organisator adalah suatu kemampuan seseorang yang dapat menghidupkan organisasi agar tercapainya sebuah tujuan bersama dengan terstruktur.

Gunawan Rama Putera dan Evi Zubaidah

Bimbingan adalah usaha- usaha yang dilakukan pihak instansi untuk mengajak mengiring serta mendorong agar UMKM dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Bina Lingkungan, termasuk dalam tanggung jawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar kawasan maupun yang mengalami dampak negative yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal. Sedangkan yang termasuk tanggung jawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain dalam kegiatan pelatihan, pesan komunikasi juga disampaikan melalui kegiatan sosialisasi dan melalui pendampingan UMKM. Dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan UMKM pihak dinas terjun langsung kelapangan untuk melihat situasi dan kondisi tempat usaha. Pesan yang disampaikan berupa tata cara untuk mendaftarkan perizinan usaha, pentingnya menjaga kualitas produk, serta pentingnya pengemasan produk untuk menarik minat masyarakat di pasaran. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu bersaing dipasar lokal maupun global sehingga dapat meningkatkan eksistensi dan keuntungan usaha itu sendiri.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah:

1. Peran fasilitator dapat disimpulkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja dalam meningkatkan produktivitas anggota pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Namun ada beberapa permasalahan yaitu masih ada kekurangan dari segi anggaran yang dinilai tidak mencukupi dalam penyelenggaraan pembinaan kewirausahaan.
2. Peran inisiator dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak secara intensif memberikan informasi mengenai kegiatan pembinaan UMKM, peran media massa seperti Koran sangat penting. Seperti yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian, media massa berupa media cetak ini hanya sebatas memberikan informasi mengenai kegiatan UMKM dan pembinaanya secara umum saja.
3. Peran organisator dapat disimpulkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat membantu pelaku usaha UMKM dalam membentuk kelompok- kelompok usaha agar mudah dibina namun keterbatasan kemampuan pelaku usaha yang tidak banyak mengerti program yang dilaksanakan.
4. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pembinaan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru secara keseluruhan belum optimal dilaksanakan. Bina Manusia sudah cukup dapat menghasilkan peserta pembina yang berkompeten, Bina Usaha sudah memberikan pembinaan bagi peserta sesuai dengan kemampuan dan keahlian peserta, Bina Lingkungan belum sepenuhnya dapat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan

pendapatan peserta yang dibina dan Bina Kelembagaan belum dapat membuat peserta menjadi mandiri dengan membuka usaha sendiri.

5. Adapun permasalahan atau hambatan yang masih di temui baik itu di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru maupun di lapangan terdiri dari 4 aspek, yaitu: Aspek Legalitas, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek Infrastruktur, dan Aspek Anggaran.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- A.W.Widjaja. 2004. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Edy Soekarno, 2006. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Khasan, 2009. *Pengembangan Organisasi*. Bandung, CV. Indra Prahasta. Feriyanto, Andri, 2015. *Pengantar Manajemen (3In1)*. Yogyakarta. Mediaterra.
- Gibson, James,L. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamid, H., dan Pramudyanto, B. 2007. *Pengawasan Dalam Pengendalian*. Jakarta: Granit. Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip- PrinsipPerumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ife. Jim dan Frank Tesoriero. 2017. *CommunityDevelopment*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta Ndraha, Taliziduhu. 2003.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan

Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.

Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.

Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.

Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.

Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.

Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.

Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.

Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Gunawan Rama Putera dan Evi Zubaidah

Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan

Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana

Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.

Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.

Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.

Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).

Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.

Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.

Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.

Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.

Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.

Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.

Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.

Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.

Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Gunawan Rama Putera dan Evi Zubaidah

Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.

- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

Gunawan Rama Putera dan Evi Zubaidah

- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.

- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.